CERMAT
"JURNAL CENDEKIAWAN DAN RISET MULTIDISIPLIN AKADEMIK TERINTEGRASI"

Homepage: https://cermat.co/index.php/cermat
E-mail: ronipasla20@gmail.com

ISSN 3090-4366 (Online)
Vol.2 No.3 Page 1-5

Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Sebagai Sistem Filsafat

Jony R Simbolon[1], Rahmat S Pane[2], Willi M Simbolon[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Medan
Author: Jony R Simbolon E-mail: jonysimbolon90@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK
Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Selain memiliki fungsi ideologis, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang memiliki keterkaitan antara aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai sistem filsafat serta menjelaskan hubungan keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan kajian Pancasila. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, serta hubungan antara dimensi filosofis dan ideologis Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi memberikan arah dan orientasi bagi kehidupan bangsa, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan dasar pemikiran mengenai hakikat manusia, sumber pengetahuan, dan nilai yang mendasari kehidupan bersama. Ketiga dimensi filosofis tersebut memperlihatkan bahwa nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar pemikiran yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi perubahan sosial. Hubungan antara dimensi filosofis dan ideologis menunjukkan bahwa penerapan Pancasila membutuhkan pemahaman terhadap nilai yang mendasarinya, sementara pemikiran filosofis Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kata Kunci: Pancasila, ideologi negara, sistem filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi.

ABSTRACT
Pancasila holds a fundamental position in Indonesian national life as the state foundation, state ideology, and national worldview. In addition to its ideological function, Pancasila can be understood as a philosophical system consisting of interconnected ontological, epistemological, and axiological dimensions. This article aims to analyze Pancasila as a state ideology and as a philosophical system and to explain the relationship between the two in social, national, and state life. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from relevant journal articles, academic books, and official documents concerning Pancasila. The data were analyzed descriptively and analytically by categorizing the literature into three themes: Pancasila as a state ideology, Pancasila as a philosophical system, and the relationship between its philosophical and ideological dimensions. The findings indicate that Pancasila as an ideology provides direction and orientation for national life, while Pancasila as a philosophical system provides a fundamental framework concerning human nature, sources of knowledge, and values underlying collective life. These philosophical dimensions demonstrate that Pancasila values are not merely normative but also have a conceptual foundation that can guide society in responding to social change. The relationship between the philosophical and ideological dimensions indicates that the implementation of Pancasila requires an understanding of its underlying values, while its philosophical ideas need to be manifested in real life.

Keywords: *Pancasila, state ideology, philosophical system, ontology, epistemology, axiology.*

PENDAHULUAN

Pancasila menempati kedudukan fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia karena berkaitan dengan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan tersebut tidak hanya memiliki arti historis dalam proses pembentukan negara Indonesia, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara yang perlu dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah pembentukan negara, tetapi juga dengan bagaimana kehidupan bangsa diarahkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila memuat nilai dan cita-cita yang menjadi orientasi kehidupan bersama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan membentuk suatu kesatuan yang menjadi dasar dalam memandang kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak berarti bahwa nilai dasarnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Keterbukaan Pancasila lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menerjemahkan nilai dasarnya dalam menghadapi persoalan dan perubahan baru.

Agus (2016) menjelaskan bahwa karakter terbuka tersebut memungkinkan Pancasila berinteraksi dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi juga berkaitan dengan fungsi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Pancasila tidak cukup dipahami sebagai seperangkat rumusan normatif, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku dan kebijakan yang mencerminkan nilai yang terkandung dalam kelima sila. Dalam kerangka pembinaan ideologi, Pancasila ditempatkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara nilai dasar Pancasila dengan proses aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022).

Selain sebagai ideologi, Pancasila dapat dikaji sebagai sistem filsafat. Pemahaman filosofis memberikan ruang untuk melihat Pancasila secara lebih mendalam melalui pertanyaan mengenai hakikat keberadaan, sumber pengetahuan, dan nilai yang menjadi dasar kehidupan. Supadjar et al. (1996) menjelaskan bahwa filsafat Pancasila dapat dikembangkan melalui landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Kajian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki keterkaitan antara dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membentuk suatu kesatuan pemikiran (Huda et al., 2025; Surajiyo & Dhika, 2026). Aspek ontologis berhubungan dengan hakikat keberadaan yang menjadi dasar pemikiran Pancasila. Dalam konteks ini, manusia menjadi unsur penting karena nilai-nilai Pancasila berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan. Aspek epistemologis berkaitan dengan sumber dan proses memperoleh pengetahuan mengenai Pancasila, sedangkan aspek aksiologis berkaitan dengan nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan melalui Pancasila. Ketiga aspek tersebut membantu menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya memiliki fungsi praktis sebagai pedoman, tetapi juga memiliki dasar pemikiran yang dapat dikaji secara filosofis (Supadjar et al., 1996; Surajiyo & Dhika, 2026). Kajian mengenai Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat telah banyak dilakukan. Namun, pembahasan kedua perspektif tersebut secara terpadu tetap penting karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Pembahasan Pancasila sebagai ideologi tanpa landasan filosofis dapat menyebabkan nilai Pancasila dipahami secara normatif tanpa pemahaman yang memadai mengenai dasar dan maknanya. Sebaliknya, pembahasan Pancasila hanya dari sisi filosofis dapat berhenti pada tataran konseptual apabila tidak dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang menghubungkan dimensi filosofis Pancasila dengan kedudukannya sebagai ideologi negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai sistem filsafat serta menjelaskan hubungan antara keduanya. Pembahasan difokuskan pada karakter Pancasila sebagai ideologi terbuka, dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, serta relevansi hubungan ideologi dan filsafat dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Pendekatan tersebut digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep dan pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem filsafat berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan Pancasila. Literatur yang digunakan mencakup pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai sistem filsafat, serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Dokumen resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa.

Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain “Pancasila sebagai ideologi negara”, “Pancasila sebagai ideologi terbuka”, “Pancasila sebagai sistem filsafat”, “ontologi Pancasila”, “epistemologi Pancasila”, dan “aksiologi Pancasila”. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian topik, relevansi terhadap tujuan penelitian, serta kredibilitas sumber. Artikel jurnal dan dokumen resmi diprioritaskan sebagai sumber pendukung analisis, sedangkan buku akademik digunakan untuk memperkuat landasan konseptual. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, sumber yang relevan diidentifikasi dan dikumpulkan. Kedua, informasi dari setiap sumber dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu ideologi Pancasila, sistem filsafat Pancasila, dan hubungan antara keduanya. Ketiga, informasi yang telah dikelompokkan dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan penekanan, serta hubungan antarkonsep. Keempat, hasil perbandingan diinterpretasikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kedudukan Pancasila secara lebih komprehensif.

Keabsahan kajian diperkuat melalui perbandingan antarsumber (*source triangulation*). Informasi mengenai konsep ideologi, sistem filsafat, dan kedudukan Pancasila dibandingkan antara sumber akademik dan dokumen

resmi. Dengan demikian, hasil pembahasan tidak hanya didasarkan pada satu perspektif, tetapi dibangun melalui keterkaitan berbagai sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai orientasi nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kedudukan tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar yang memberikan arah terhadap kehidupan bersama dan menjadi rujukan dalam memahami tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dokumen pembinaan ideologi, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara yang perlu diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022). Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter yang berbeda dari ideologi yang bersifat tertutup. Keterbukaan Pancasila memungkinkan nilai dasarnya tetap menjadi landasan, sementara penerapannya dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Agus (2016) menjelaskan bahwa keterbukaan tersebut berkaitan dengan kemampuan Pancasila untuk berinteraksi dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, keterbukaan tersebut memiliki arti bahwa Pancasila tidak harus diterapkan dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Nilai persatuan, misalnya, dapat diwujudkan dalam konteks keberagaman masyarakat, tetapi bentuk penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang. Demikian pula nilai keadilan dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang terus mengalami perubahan. Dengan demikian, keterbukaan Pancasila terletak pada penerapan nilai, bukan pada perubahan nilai dasarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, Pancasila memiliki nilai dasar yang menjadi identitas dan orientasi bangsa. Di sisi lain, nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata agar tidak berhenti sebagai gagasan normatif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi perlu menghubungkan antara nilai dasar dan aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat.

Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat menunjukkan bahwa kelima sila tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan pemikiran. Setiap sila memiliki hubungan dengan sila lainnya sehingga makna masing-masing sila perlu dipahami dalam keterkaitannya dengan keseluruhan sistem. Kajian mengenai sistem filsafat Pancasila menempatkan hubungan antarsila sebagai salah satu karakter penting yang membentuk keutuhan pemikiran Pancasila (Huda et al., 2025). Pemahaman tersebut dapat diperjelas melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, Pancasila berkaitan dengan pertanyaan mengenai hakikat keberadaan yang menjadi dasar nilai-nilainya. Manusia menempati posisi penting dalam pembahasan ini karena nilai Pancasila berhubungan dengan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi individual dan sosial serta hubungan dengan Tuhan. Supadjar et al. (1996) menempatkan aspek ontologis sebagai salah satu landasan dalam pengembangan filsafat Pancasila.

Secara epistemologis, pembahasan Pancasila berkaitan dengan sumber dan proses terbentuknya pengetahuan mengenai nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat dan proses historis pembentukan bangsa. Dengan demikian, pemahaman mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat juga perlu memperhatikan proses terbentuknya gagasan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Secara aksiologis, Pancasila berkaitan dengan persoalan nilai dan penerapannya dalam kehidupan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi menjadi dasar untuk menentukan bagaimana manusia bertindak dalam kehidupan bersama. Kajian Surajiyo dan Dhika (2026) menunjukkan bahwa dimensi aksiologis Pancasila berhubungan dengan tujuan praksis kehidupan manusia dan terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, serta kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki hubungan antara hakikat, pengetahuan, dan nilai. Ontologi memberikan dasar mengenai apa yang menjadi hakikat pembahasan Pancasila, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan mengenai Pancasila dipahami, sedangkan aksiologi menunjukkan nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan. Ketiganya membentuk kerangka yang membantu memahami Pancasila secara lebih mendalam.

Hubungan Ideologi dan Sistem Filsafat Pancasila

Hasil kajian memperlihatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai sistem filsafat memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi. Dimensi filosofis memberikan dasar pemikiran terhadap nilai-nilai Pancasila, sedangkan dimensi ideologis memberikan arah bagi penerapan nilai tersebut dalam kehidupan bersama. Hubungan tersebut membuat Pancasila tidak hanya dipahami sebagai pemikiran teoritis maupun sekadar pedoman praktis, tetapi sebagai kesatuan antara nilai, pemikiran, dan tindakan. Dari perspektif filosofis, nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki dasar yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari perspektif ideologis, nilai tersebut diterjemahkan menjadi orientasi dalam kehidupan masyarakat

dan negara. Artinya, filsafat menjelaskan dasar dan makna nilai, sementara ideologi membantu mengarahkan bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan.

Hubungan tersebut juga menjelaskan mengapa pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup dilakukan melalui hafalan. Jika Pancasila hanya dipahami sebagai lima rumusan sila, seseorang dapat mengetahui bunyinya tanpa memahami alasan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, pemahaman filosofis yang tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata dapat berhenti sebagai pengetahuan teoritis. Oleh karena itu, kedua dimensi tersebut perlu dipahami secara bersamaan. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan masyarakat, hubungan antara ideologi dan filsafat Pancasila menjadi penting karena pemahaman nilai perlu diikuti dengan kemampuan menerapkannya. Pendidikan Pancasila tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan cara berpikir dan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Huda et al. (2025) menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki relevansi dalam pendidikan dan kehidupan sosial budaya, terutama karena nilai-nilainya dapat menjadi landasan dalam membentuk kehidupan bersama.

Relevansi Pancasila dalam Menghadapi Perubahan Sosial

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya interaksi dengan berbagai pemikiran dari luar membuat penerapan nilai Pancasila menghadapi konteks yang terus berubah. Dalam kondisi tersebut, karakter Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi penting. Keterbukaan memungkinkan nilai dasar Pancasila tetap dipertahankan, tetapi penerapannya dapat disesuaikan dengan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Agus, 2016). Relevansi Pancasila dapat dilihat melalui penerapan masing-masing nilai dalam konteks kehidupan masyarakat. Nilai ketuhanan berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan beragama dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai kemanusiaan berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai persatuan berkaitan dengan kemampuan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Nilai kerakyatan berkaitan dengan musyawarah dan partisipasi dalam kehidupan bersama, sedangkan nilai keadilan berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang adil bagi masyarakat.

Namun, penerapan tersebut perlu didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna setiap nilai. Di sinilah sistem filsafat memiliki peran penting. Pendekatan filosofis memungkinkan masyarakat tidak hanya mengetahui tindakan yang sesuai dengan Pancasila, tetapi juga memahami alasan mengapa tindakan tersebut penting. Dengan demikian, pemahaman filosofis dapat memperkuat penerapan Pancasila sebagai ideologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relevansi Pancasila tidak bergantung pada kemampuan mengubah nilai dasarnya mengikuti setiap perubahan. Sebaliknya, relevansi terletak pada kemampuan menerjemahkan nilai dasar tersebut ke dalam persoalan baru. Dengan cara ini, Pancasila dapat tetap menjadi pedoman dalam masyarakat yang mengalami perubahan tanpa kehilangan identitas nilai yang menjadi dasarnya.

Analisis Keterpaduan Ideologi dan Filsafat Pancasila di Era Perubahan

Berdasarkan perbandingan berbagai sumber, dapat dianalisis bahwa hubungan antara ideologi dan filsafat Pancasila membentuk tiga tingkatan yang saling berkaitan, yaitu nilai, pemikiran, dan praksis. Nilai merupakan substansi yang terkandung dalam Pancasila, pemikiran filosofis memberikan dasar untuk memahami substansi tersebut, sedangkan ideologi mengarahkan penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Keterpaduan tersebut penting karena persoalan kehidupan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menghafalkan nilai atau prinsip. Diperlukan kemampuan untuk memahami konteks persoalan, menghubungkannya dengan nilai Pancasila, dan menentukan bentuk penerapan yang sesuai. Dengan kata lain, penerapan Pancasila membutuhkan proses berpikir yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara tidak seharusnya dipisahkan dalam pembelajaran maupun pengamalannya. Sistem filsafat memberikan kedalaman konseptual, sedangkan ideologi memberikan arah praksis. Hubungan keduanya memungkinkan Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki dasar pemikiran sekaligus memiliki orientasi terhadap tindakan. Oleh karena itu, penguatan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan mempertemukan pemahaman filosofis dan praktik kehidupan. Pendidikan, kebijakan publik, kehidupan sosial, serta penggunaan teknologi dapat menjadi ruang aktualisasi nilai Pancasila selama penerapannya tetap berangkat dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat terus dipahami secara kontekstual tanpa kehilangan kedudukan dan identitas dasarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, Pancasila memiliki kedudukan yang saling berkaitan sebagai ideologi negara dan sebagai sistem filsafat. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dan orientasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadi dasar dalam mengaktualisasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karakter Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai dasarnya tetap dipertahankan sementara penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berkaitan. Dimensi ontologis berkaitan dengan hakikat manusia dan keberadaan yang menjadi dasar pemikiran Pancasila, dimensi epistemologis berkaitan dengan sumber serta proses terbentuknya pengetahuan mengenai Pancasila, sedangkan dimensi aksiologis berkaitan dengan nilai dan tujuan yang diwujudkan dalam kehidupan.

Hubungan antara Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat menunjukkan bahwa keduanya membentuk kesatuan antara nilai, pemikiran, dan praksis. Filsafat memberikan dasar pemikiran yang lebih mendalam terhadap nilai Pancasila, sedangkan ideologi memberikan arah penerapan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila perlu dipahami tidak hanya melalui hafalan atau pemahaman normatif, tetapi juga melalui kajian filosofis yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila secara kontekstual di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office, 2*(2). https://doi.org/10.26858/jo.v2i2.2958

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang materi dasar pembinaan ideologi Pancasila*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Huda, K., Pratiwi, G. A., Lubis, M., & Hawa, N. (2025). Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pendidikan dan kehidupan sosial budaya. *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 9*(2).

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Notonagoro. (1980). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tudjuh.

Supadjar, D., Mudhofir, A., Soeprapto, S., & Bakry, N. M. (1996). Landasan pengembangan filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat, 26*. https://doi.org/10.22146/jf.31641

Surajiyo, & Dhika, H. (2026). Pancasila sebagai sistem filsafat: Analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *IKON: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 30*(2). https://doi.org/10.37817/ikon.v30i2.6958